



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PERHUBUNGAN, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 13 (tiga belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 21 Juni 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.15 WIB s.d 13.15 WIB
Tempat	: Ballroom A, Hotel Arya Duta Tugu Tani – Jakarta Pusat
Acara	: Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si.
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 10:15 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
3. Ketua Rapat mempersilahkan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 556 Miliar,
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 86 Miliar, dan
  - c. Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 232 Miliar.
2. Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan hasil rapat Kementerian Perhubungan dengan instansi dan sektor terkait dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI serta diputuskan dalam pembahasan Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan *outcome*-nya dapat lolos dalam usulan pada Tahun Anggaran 2013.
4. Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) termasuk pemberian *blacklist* pada penyedia jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengatasi permasalahan penyeberangan Merak-Bakauheni melalui :
  - a. melakukan kajian komprehensif terhadap penyelenggaraan antar moda transportasi dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (*public private partnership*) dalam rangka memberikan ketegasan dan kepastian bagi investasi, dan
  - b. membangun sistem informasi Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni termasuk informasi secara *real time*.
6. Komisi V DPR RI meminta Balitbang Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan konsep Sistem Transportasi Nasional, termasuk strategi moda transportasi lain dalam meminimalisir beban transportasi darat dan optimalisasi sarana prasarana transportasi untuk pengangkutan barang dan penumpang.
7. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk menginventarisir seluruh program/kegiatan yang sedang berjalan (*on going project*) dan memprioritaskan penyelesaian program/kegiatan tersebut, sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat.
8. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar strategi pemaketan pekerjaan jasa konsultansi disesuaikan dengan ketersediaan tenaga ahli.

9. Komisi V DPR RI meminta ...../hal 3

9. Komisi V DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk mempertajam Standar Operasional Prosedur (SOP), indikator dan parameter yang terukur terhadap pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 21 Juni 2012

**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**H. MUHIDIN M. SAID**

**INSPEKTUR JENDERAL/  
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,**

**TTD**

**ISKANDAR ABUBAKAR**

**KEPALA BALITBANG,**

**TTD**

**L. DENNY SIAHAAN**